

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Politik dan media saat ini merupakan hal yang sudah tidak dapat dipisahkan lagi. Politik juga sangat erat dengan budaya populer dan industri perfilman. Industri perfilman saat ini menjadi salah satu komponen penting dalam perpolitikan suatu negara, termasuk China. Film sebagai bagian dari industri kreatif dan produk budaya memiliki potensi yang sangat besar dibandingkan dengan produk budaya lainnya. Salah satu penggunaan film yang paling menarik secara filosofis adalah sebagai kendaraan untuk propaganda (Jason, 2013). Film juga mampu merealisasikan ide maupun pesan tertentu ke masyarakat dalam format hiburan yang menarik. Melalui narasi, film tentu dapat menggiring dan mempengaruhi opini publik terhadap suatu isu tertentu.

Unsur ideologi sebuah negara tentu juga berpengaruh pada perfilman di suatu negara, termasuk China. Dalam perkembangannya perfilman China sangat kental dengan unsur komunis dan menjadi alat propaganda. Sejarah perkembangan perfilman China dimasa lalu terbagi menjadi beberapa zaman keemasan. Keemasan pertama terjadi selama 1930-an. Masa keemasan kedua terjadi pada tahun 1940-an di mana industri tumbuh dan berkembang. Pada masa-masa ini dan kedepannya sangat jelas bahwa film China sangat di dominasi oleh paham komunis sosialis. Zaman keemasan yang ketiga terjadi pada tahun 1980-an, di sinilah film-film dari semua jenis mulai dibuat: film drama, film satir, film fiksi ilmiah dan bahkan film kung-fu yang tidak biasa dalam sejarah film China seperti yang terlihat (Aranburu, 2017). Di era ini juga untuk pertama kalinya negara berpendapat, bahwa film adalah bagian integral dari industri budaya, bukan hanya

instrumen untuk memperkuat ideologi pemerintah. Tahun berikutnya China mengalami penurunan dari segi produksi film domestiknya yang berimbas pada menjamurnya film asing di China yang merupakan dampak dari kebijakan China yang membuka pasar seluas-luasnya. Perfilman China kemudian kembali meningkat masuk pada tahun 2000-an hingga sekarang dimana China menghasilkan banyak film setiap tahunnya, misalnya *Kung fu Hustle*.

Pertumbuhan ekonomi China selama tiga dekade terakhir hingga tahun 2010 mencapai rata-rata 10%, walau kemudian pertumbuhan itu melambat (BBC, 2015). Pertumbuhan ekonomi yang pesat membuat perekonomian China kini berada di atas negara-negara maju Eropa dan Jepang. Pertumbuhan ekonomi yang pesat tersebut dalam beberapa tahun terakhir menjadikan China sebagai salah satu negara dengan GDP terbesar di dunia pada tahun 2014 \$10,482,372.11 dan meningkat pada tahun 2017 sebesar \$12,237,700.48 (World bank, 2018). Pendapatan industri perfilman di China sendiri menyumbang sekitar 0.6 % dari PDB dan menghasilkan sekitar 0,7% dari total pendapat ditahun 2014 (Oxford Economic, 2015). Persentasi ini tentu akan bertambah melihat di tahun berikut-berikutnya angka keuntungan dari industri ini terus meningkat. Kondisi ini tentu memperlihatkan bahwa semakin banyak masyarakat kelas menengah yang berada di China. Pertumbuhan masyarakat kelas menengah China memunculkan perilaku masyarakat yang konsumtif dan tentunya membuat perubahan baru di pasar industri hiburan. Saat ini tentu semakin banyak penduduk kelas menengah maka semakin banyak orang yang mengiginkan tontonan berkualitas, hal ini menjadikan China sebagai pasar yang sangat potensial.

Pasar perfilman China telah berkembang pesat dan sekarang menjadi salah satu yang terbesar dibawah Amerika Serikat (O'Connor & Armstrong, 2015). Terhitung penjualan tiket China terus mengalami peningkatan dengan kecepatan yang pesat, pada 2013 tumbuh dari \$ 3,6 miliar mengalami lonjakan

sebesar 27 persen dari \$ 2,8 miliar pada 2012 kemudian naik lagi 36 persen pada tahun 2014 menjadi \$ 4,8 miliar (O'Connor & Armstrong, 2015), *Box office* di China menjadi pasar film terbesar kedua di dunia dan kembali tumbuh 48,7 persen pada tahun 2015, mencapai rekor \$ 6,78 miliar (Brzeski, 2015). Angka tersebut terus bertambah setiap tahunnya hingga 2018. Walaupun perfilman Hollywood masih mendapat pendapatan fantastis di pasar China, namun pada 1-2 tahun terakhir film Hollywood tidak lagi berada paling atas, justru pendapatan film terbesar di China adalah film lokal. Ditahun 2017 pendapatan film lokal China *wolf warriors 2* berhasil memuncaki tangga film terlaris di China mengalahkan *The Fate of the Furious*. Tercatat *wolf warriors 2* \$854,248,869 sedangkan *The Fate of the Furious* hanya \$392,807,017 (IMDb, 2018). Melihat keberhasilan film lokal dalam perolehan tertinggi *box office* menjadi tantangan tersendiri bagi produsen film Hollywood dalam beberapa tahun terakhir walapun begitu film Hollywood masih mendominasi secara menyeluruh. Tentunya bersaing dengan produsen film asing seperti Hollywood tidak mudah, mengingat Hollywood merupakan aktor utama dalam industri perfilman dunia dengan segala keunggulannya. Kondisi ini menjadi salah satu tantangan yang dihadapi China dalam mengelola industri perfilmanya.

Industri perfilman Amerika Serikat atau Hollywood merupakan pemain utama di industri perfilman dunia. Film produksi Hollywood sudah mulai tayang di pasar luar negeri sejak 1920. Film-film Hollywood bahkan hampir selalu menempati posisi pertama di setiap pasar perfilman hampir disetiap negara. Dengan kata lain industri perfilman Amerika merupakan industri perfilman paling dominan di seluruh dunia. Terlepas dari industri perfilman india atau Bollywood menjadi industri perfilman paling banyak memproduksi film, Hollywood tetap menjadi yang pertama dalam raihan keuntungan maupun dana produksi film itu sendiri yang berimbang pada kualitas film. Dengan begitu sudah sangat jelas

bahwa pasar internasional sangat penting bagi Hollywood. Tercatat film seperti *Ice Age: Continental Drift*, film Franchise animasi Century Fox ini telah membuat \$ 157 juta di Amerika Utara dan \$ 677 juta di luar negeri sedangkan *Harry Potter and the Deathly Hallows* menghasilkan \$ 381 juta di dalam negeri, dan \$ 947 juta untuk pasar luar negerinya (Galloway, 2012). Film sebagai bagian *pop-culture* merupakan salah ladang bisnis yang tidak bisa di anggap gampang begitu saja. Dengan catatan penghasilan yang fantastis tersebut tentu berbagai cara dilakukan untuk mendapatkan penonton. Beberapa studio telah menciptakan operasi untuk membiayai produk bahasa lokal. Legendary Pictures, yang ikut membiayai seri Batman, bahkan telah membentuk sebuah usaha hanya untuk bersama-sama mendanai film-film China, dan 20th Century Fox adalah salah satu pendukung dari epik bahasa China John Woo, *Red Cliff* (Galloway, 2012). Pada saat yang sama, agensi-agensi bakat terkemuka seperti Creative Artists Agency telah membuka kantor-kantor asing, termasuk satu di Beijing, untuk mencari pembuat film lokal dan meningkatkan potensi untuk produksi bersama. Hal tersebut memperkuat bahwa film merupakan salah satu ekspor yang dapat diandalkan Amerika Serikat.

Jika kita berbicara lebih jauh, pada dasarnya bagi negara besar seperti Amerika menggunakan media seperti film untuk membangun cerita. Film terkadang dibuat berdasarkan isu yang terjadi pada zamannya yang berakhir pada penggirangan opini masyarakat secara luas. Dapat diambil contoh pada peristiwa 11 September, film bersimpati terhadap keterlibatan AS bermunculan sementara film yang berpotensi mengkritisi seperti “Perang melawan teror” seperti *Buffalo Soldier* ditunda penayangannya dan di tolak sebagian kalangan di AS. Kemudian film besar lain seperti *independance Day* mengkomunikasikan dan mempromosikan pandangan yang sangat spesifik tentang bagaimana sebuah negara harus berperan dan apa peran AS dalam mengatasi “ancaman external” (doods, 2012). Misalnya beberapa tahun terakhir

yang marak dengan isu LGBT film seperti *Love Simon* menjadi bagian bahwa LGBT adalah suatu yang normal dan menggiring opini masyarakat untuk prihatin terhadap isu tersebut. Lebih lanjut film-film Hollywood akan menyesuaikan filmnya tergantung pasar yang akan mereka tuju. Contohnya film dengan adegan seksual lebih banyak diterima di wilayah barat ketimbang timur. Biasanya para sutradara akan membuat film dalam dua versi untuk beberapa adegan, adegan dengan kandungan seksual lebih kental untuk pasar Amerika dan Eropa dan adegan yang minim untuk pasar asia.

Film yang merupakan produk budaya sekaligus komoditas pada dasarnya, dianggap oleh banyak orang sebagai jenis barang khusus. Secara global, banyak negara mengadopsi kebijakan budaya proteksionis atau restriktif terhadap produk budaya asing (Lin, 2007). China sebagai negara juga menggunakan kebijakan proteksi terhadap barang yang masuk ke China terutama produk seperti film. China sendiri diantaranya memiliki 2 kebijakan perdagangan terkait perfilman. Pertama adalah Kuota Impor. China membatasi film-film asing masuk ke pasar domestiknya, dengan hanya memberikan jumlah kota 34 film pertahunnya dengan sistem bagi hasil. Selain itu aturan lain yakni film yang diperbolehkan masuk jika film tersebut lisensinya telah dibeli oleh distributor China dan tidak ada pembagian hasil. Kedua adalah kuota sensor. China sendiri memberlakukan sistem sensor terhadap film asing terutama Hollywood. Sensor tersebut dapat berupa pemotongan adegan dan lainnya.

Berdasarkan pada kasus di atas, kemudian sangat menarik untuk meneliti lebih lanjut Mengapa China membatasi masuknya film Hollywood ke China serta bagaimana perkembangan industri perfilman China mempengaruhi pembuatan kebijakan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis merumuskan masalah dalam pertanyaan sebagai berikut: Mengapa Pemerintah China membatasi masuknya Film- Film Hollywood ke pasar China?

## **C. Kerangka Pemikiran**

### **1. Kepentingan Nasional**

Kepentingan nasional adalah sebuah konsep yang selalu melekat di setiap negara untuk menggambarkan perilaku sebuah negara. Kepentingan nasional juga sudah sangat melekat pada setiap negara. Dapat dijelaskan bahwa kepentingan nasional adalah tujuan yang berusaha dicapai oleh suatu negara demi kemakmuran negaranya. Kepentingan nasional juga digunakan sebagai kriteria dasar bagi pengambil keputusan di setiap negara sebelum merumuskan dan menetapkan kebijakannya. Sehingga setiap langkah kebijakan luar negeri perlu didasarkan pada kepentingan nasional dan diarahkan untuk mencapai dan melindungi kepentingan nasional itu sendiri (Rudy, 2002). Kepentingan sendiri merupakan sebuah hasil kompromi dari kepentingan – kepentingan politik yang saling bertentangan dan bukan merupakan suatu ide yang dicapai secara abstrak dan saintifik.

Dalam buku Mochtar Mas'od, Morgenthau menjelaskan bahwa kepentingan nasional adalah instrumen untuk mendapatkan kekuasaan. Pemikirannya didasarkan pada asumsi bahwa strategi diplomatik harus didasarkan pada kepentingan nasional, bukan alasan moral, hukum dan sesuatu yang idealis dianggap utopis dan bahkan berbahaya (Mas'od, 1990). Morgenthau menambahkan bahwa kepentingan nasional negara adalah tentang mengejar kekuasaan, yang merupakan segala sesuatu yang dapat membentuk dan mempertahankan kontrol suatu negara atas negara lain.

Morgenthau juga menyatakan bahwa dasarnya kekuasaan dan kepentingan dapat dianggap sebagai sarana dan sekaligus tujuan dari tindakan politik internasional. Lebih lanjut Menurut Morgenthau, konsep kepentingan nasional dalam dua hal mirip dengan 'konsep umum' dalam konstitusi (Amerika), seperti kesejahteraan umum dan hak perlindungan hukum. Konsep tersebut mengandung makna yang melekat, tetapi di luar pemahaman dasar tersebut, konsep tersebut dapat ditafsirkan oleh berbagai hal yang secara logis sesuai dengannya. Isi konsep ditentukan oleh tradisi politik dan konteks budaya keseluruhan di suatu negara merumuskan kebijakan luar negerinya (Mas'ood, 1990).

Pengertian lain tentang kepentingan nasional juga dapat diartikan sebagai keberlangsungan hidup. Dalam pandangan Morgenthau sendiri, kemampuan dasar sebuah negara adalah dapat melindungi identitas fisik, politik dan kulturalnya dari serangan serta gangguan negara luar. Lebih spesifik dapat diartikan negara-bangsa harus bisa mempertahankan integritas teritorialnya, rezim ekonomi-politik, dan memelihara norma-norma etnis, religius, linguistik dan sejarahnya.

Dari konsep kepentingan nasional yang sudah dijelaskan, China tentu menjadi salah satu negara yang memiliki kepentingan nasional atas tindakan-tindakan ataupun kebijakan yang diambil pembuat keputusannya. Dalam kasus yang diangkat oleh penulis China sebagai sebuah negara menentukan kebijakan yang membendung masuknya film-film Hollywood tentu juga didasarkan oleh keinginan memenuhi dan melindungi kepentingan nasionalnya.

Pada dasarnya barang-barang budaya seperti film, program televisi, dan publikasi adalah kendaraan untuk transmisi ideologi, nilai-nilai, dan gaya hidup yang dapat dilihat sebagai korosif atau merusak budaya penerima (Baughn & Buchanan, 2001). Amerika Serikat sebagai sebuah negara yang menggerakkan Hollywood memiliki ideologi dan budaya yang sangat jelas bertolak belakang dengan China. China

merupakan negara yang berlandaskan sosialis dan Amerika liberalis. Film merupakan sebuah media yang paling efektif dalam menyebarkan ideologi dan budaya. Di mana film dapat dengan tersirat memiliki kandungan negara asal serta dapat dikemas dengan bentuk hiburan yang menarik. Misalnya budaya kebebasan yang ditampilkan oleh Hollywood merupakan hal yang paling vokal ada difilm Hollywood. Banyak contoh film terutama yang bergenre *Flick teen* seperti *American Pie*(1999), *The Breakfast Club*(1985), atau *Love Simon*(2018). Film seperti *Argo*(2012), *Pearl Harbor*(2001) hingga film-film MCU semua tidak luput dari propaganda Amerika Serikat. Sudah seharusnya sebuah negara melindungi ideologi yang dianut sejak lama. Membanjirnya film Hollywood di China justru dapat menimbulkan kekhawatiran akan memudarnya ideologi tersebut. Untuk itu film Hollywood harus ditekan agar tidak menyebar secara luas.

Selain budaya dan ideologi, hal paling utama justru terletak pada segi ekonominya itu sendiri. China merupakan negara dengan penduduk terbanyak didunia dan menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi masyarakat yang cukup pesat. Di mana saat ini banyak masyarakat kelas menengah di China. Hal ini membuat China menjadi pasar yang potensial sekaligus mangsa empuk bagi Hollywood. Film-film Hollywood yang laku keras di China tidak hanya berdampak pada memakmurkan negara pesaingannya tersebut namun juga membuat industri perfilman China terancam. Dengan perolehan pendapatan dan jumlah penonton sudah seharusnya bagi China menjadi raja di rumah sendiri, ditambah besarnya investasi China ke industri perfilman ke dalam dan luar negeri. Persaingan dengan Hollywood bukanlah hal yang mudah karena Hollywood merupakan kiblat film-film di seluruh dunia. Untuk itu, demi melindungi hal tersebut serangkaian kebijakan harus di dilakukan, salah satunya proteksionisme.



## 2. Proteksionisme

Proteksionisme secara umum dapat diartikan sebagai langkah pemerintah di suatu negara untuk melindungi pasar dalam negerinya dari masuknya produk-produk impor. Pemahaman tentang proteksionisme ini diawali dengan teori besarnya yakni ekonomi politik internasional. Ekonomi politik internasional dibagi dalam beberapa perspektif yakni *Merkantilis, Liberalis, Radikal, dan Reformis* (Mas'ood, 2008). Perspektif merkantilis juga dikenal sebagai nasionalisme ekonomi atau dalam literturnya dapat dikenal juga sebagai realisme politik. Sebagai teori dan praktek ekonomi, merkantilisme populer bagi pemerintah yang sedang melakukan pembinaan kekuatan negara karena upaya seperti itu memerlukan pengintegrasian politik dan ekonomi, maka negara menjadi aktor utama yang secara aktif dan rasional mengatur ekonomi demi meningkatkan kekuasaan negara.

Dalam membangun negara-bangsa yang kuat juga memerlukan pengumpulan kekayaan. Karena itu pembangunan ekonomi itu sendiri harus diprioritaskan. Jika upaya tersebut tidak cukup dilakukan di dalam negeri, perdagangan internasional harus digalakkan sebagai sarana perjuangan mencapai kepentingan nasional, yaitu akumulasi kapital demi memperoleh surplus sebanyak mungkin dari perdagangan internasional, dalam lingkungan yang penuh konflik, pemerintah masing-masing negara harus mengembangkan kebijaksanaan "nasionalis-ekonomi". Diantaranya dengan cara menerapkan pengendalian harga dan upah buruh sehingga barang-barang yang dihasilkan bisa dijual dengan harga bersaing pasar internasional, menerapkan strategi industrialisasi substitusi-impor, menggalakkan ekspor barang manufaktur dan membatasi impor yang hanya untuk komoditi dasar. Kebijakan tersebut penting demi memenangkan perang ekonomi dalam panggung internasional.

Istilah ini telah muncul pada 1620-an kemudin diperjelas oleh Marquis de Mirabeau pada tahun 1763 ke dalam sebuah konsep perdagangan. Teori merkantilisme sendiri melihat

bagaimana sebuah negara sebagai aktor utama melakukan intervensi langsung dalam perumusan dan pengawasan kebijakan ekonominya untuk melindungi produsen dan pedagang lokal. Adam Smith juga memperbarui pemahamn ini dengan melihat tujuan dari kebijakan ekonomi dengan berusaha untuk meningkatkan ekspor daripada impor yang bertujuan agar neraca perdagangan sebuah negara mengalami surplus.

Menurut pendapat Heckscher, merkantilisme sebagai fase dalam pengembangan kebijakan ekonomi memiliki keempat aspek (Haley, 1936). **Pertama**, merkantilisme adalah sistem kebijakan ekonomi yang dirancang untuk mempromosikan penyatuan negara. Pada abad pertengahan, klaim negara pada individu telah bertentangan dengan universalisme di satu sisi dan khususnya di sisi lain. Periode modern dimulai dengan upaya negara untuk mencapai penyatuan sehubungan dengan hambatan bea cukai dan tol, sistem mata uang, pengaturan kegiatan industri, perdagangan dalam dan luar negeri, dan sistem bobot dan ukuran.

**Kedua**, merkantilisme adalah sistem kebijakan ekonomi yang dirancang untuk meningkatkan kekuatan negara; semua kegiatan ekonomi dibuat tunduk untuk itu. Upaya dilakukan secara langsung untuk mempengaruhi pasokan komoditas dan jasa tertentu yang dianggap penting bagi kekuatan negara, misalnya, kapal, pelaut, toko angkatan laut, dan bahan baku yang dapat dijual. Selain itu, merkantilis merealisasikan bahwa kekuasaan negara akan dipromosikan oleh peningkatan umum dalam pendapatan nasional total, yang mungkin ditarik oleh negara melalui perpajakan. Hal ini adalah sarana untuk tujuan ini sehingga mereka mengembangkan kebijakan proteksionisme dan kebijakan moneter mereka.

**Ketiga**, merkantilisme dapat didefinisikan sebagai sistem kebijakan ekonomi yang dirancang untuk mempromosikan kekayaan, dan dengan demikian kekuatan, negara melalui perlindungan sistematis dari produsen kubah. **Keempat**, merkantilisme dapat dianggap sebagai sistem kebijakan moneter. Tindakan telah disetujui yang diyakini mengarah

pada peningkatan jumlah uang dan logam mulia di dalam negeri, dan langkah-langkah yang mungkin mengarah pada hasil sebaliknya tidak disetujui.

Melalui teori besar merkantilisme dilihat munculnya reaksi dari negara terhadap pengaruh produk impor. Produk impor akan mengurangi eksistensi dari produk dalam negeri. Adanya organisasi perdagangan internasional seperti WTO membuat negara anggotanya harus menghapus segala macam hambatan bagi produk impor tentu memunculkan dampak negatif bagi produk lokal. Oleh karena itu, negara-negara mengeluarkan serangkaian kebijakan proteksi untuk membendung pengaruh produk impor dan melindungi produk lokal.

Dalam kamus ekonomi, proteksionisme diartikan dalam dua hal. Pertama merupakan paham perlindungan terhadap dunia usaha yang dilakukan pemerintah. Kedua adalah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai upaya untuk mengendalikan impor atau ekspor, dengan jalan mengatasi berbagai hambatan perdagangan, seperti tarif kuota, dengan tujuan melindungi industri atau dunia usaha dalam negeri dari persaingan dengan luar negeri (Sumadji, Yudha, & Rosita, 2006). Kebijakan Proteksionisme ini juga bertujuan untuk melindungi kepentingan ekonomi, kepentingan industri dalam negeri, melindungi lapangan kerja hingga stabilitas mata uang di suatu negara tersebut.

Proteksionisme sendiri merupakan bentuk kritik terhadap teori pasar bebas yang dikemukakan oleh Adam Smith yang menyatakan bahwa pasar dapat tumbuh dengan baik dengan sendirinya tanpa adanya campur tangan negara. Friedrich List, dalam buku yang berjudul *The National System of Political Economy* 1841 menyatakan bahwa sumber kekuatan negara adalah kekuatan produktif mereka (Four, 1997). Hal ini perlu untuk menghadapi perdagangan internasional atau liberalisasi. Dikarenakan menghasilkan barang produksi lebih penting daripada hasil produksi maka kebijakan yang sifatnya proteksi sangat diperlukan.

Friedrich List juga mengkritik bahwa tugas negara pada dasarnya adalah menciptakan kemakmuran untuk

masyarakatnya sedangkan kekayaan dan kemakmuran tidak hanya berasal dari modal material saja namun juga oleh interaksi dari keahlian manusia, industri, dan inisiatif (Boianovsky, 2013). List sendiri mendefinisikan tiga jenis modal yang berbeda yang menjadi kekuatan produktivitas suatu negara yaitu modal alam, modal materi dan modal pikiran. Modal alam terdiri atas tanah, laut, sungai dan sumber daya mineral. Modal materi terdiri dari semua benda, seperti mesin, peralatan dan bahan mentah, yang digunakan secara langsung atau tidak langsung dalam proses produksi. Modal pikiran mengacu pada keterampilan, pelatihan, industri, perusahaan, militer, kekuatan angkatan laut dan pemerintah. Ia juga menambahkan bahwa peran penting negara dalam bidang ekonomi adalah untuk melindungi dan memperbesar kekuatan produktivitas nasional melalui pengembangan industri karena industri ini erat kaitannya dengan perkembangan teknologi, perbaikan infrastruktur, kebebasan politik, dan alat mencapai kemakmuran.

Dengan demikian proteksionisme merupakan sebuah kebijakan perdagangan yang lebih baik daripada kebijakan perdagangan lainnya. pembuat kebijakan sering merujuk pada kebutuhan untuk menyamakan lapangan bermain sebagai motivasi untuk proteksionisme. Sekumpulan argumen yang termasuk dalam kategori ini didasarkan pada motif pengembangan. Secara historis, banyak negara berkembang menerapkan kebijakan substitusi impor guna melindungi “industri kecil” dari persaingan internasional. Hambatan perdagangan yang tinggi diperlukan untuk mengimbangi produktivitas yang lebih tinggi di negara maju (National Board of Trade, 2016). Proteksionisme juga dilakukan untuk menstabilkan ekonomi nasional. Negara-negara berkembang berpendapat bahwa mereka tidak dapat bersaing dengan perusahaan-perusahaan negara maju yang memiliki produktivitas tinggi. Oleh karena itu perlindungan diperlukan. Sedangkan negara-negara maju berpendapat bahwa mereka tidak dapat bersaing dengan upah rendah dan undang-undang tenaga kerja / lingkungan yang kurang ketat di negara-negara

berkembang. Selain itu, motif lapangan yang paling banyak untuk perlindungan didasarkan pada keyakinan bahwa pola perdagangan pada kenyataannya tidak ditentukan oleh keunggulan komparatif tetapi oleh perbedaan dalam produktivitas absolut. Akibatnya, proteksionisme tumbuh subur dalam suasana *usversus*-mereka di mana perdagangan dipandang sebagai *zero-sum competition* antar negara dan bukan sebagai institusi cerdas yang dapat melayani dan merangsang ekonomi. Namun motif lain untuk mempertahankan hambatan perdagangan berkaitan dengan kekhawatiran bahwa penyesuaian struktural yang terkait dengan liberalisasi perdagangan akan menghancurkan lebih banyak pekerjaan daripada yang diciptakannya.

Proteksionisme sendiri dalam proses globalisasi ekonomi telah berkembang dari kebijakan perdagangan berdasarkan pengenalan batasan tarif, dan kemudian dari instrumen perlindungan non-tarif, menjadi komprehensif yang kompleks dimana ada mekanisme negara untuk meningkatkan daya saing ekonomi nasional dalam proses globalisasi (Panchenko & Reznikova, 2017). Pada prinsipnya kepentingan dalam negeri harus menjadi yang utama dalam pasar ketimbang kepentingan asing terutama pada ranah kompetisi dengan pasar luar. Produsen domestik tidak akan mengalami perkembangan jika produsen asing menguasai pasar disuatu negara. Dengan kata lain proteksionisme dalam konteks perdagangan internasional merupakan sebuah tindakan yang di ambil oleh negara untuk memberikan perlakuan istimewa atau berbeda terhadap produk dengan tujuan melindungi perdagangan atas competitor produk dan sejenis dari negara lain. Dasarnya proteksionisme adalah tindakan yang dibuktikan dengan kebijakan yang merespon ketakutan dari sebuah negara terhadap produk asing yang akan mengusik dan menguasai pasar dalam negerinya dan memiliki imbas sosial terhadap masyarakat di negara tersebut. Seperti halnya China yang merasa terlalu derasnya perfilman Hollywood yang masuk dapat mengganggu pasar domestiknya di industri perfilman yang dalam perkembangan baik serta mengakibatkan pergeseran nilai-nilai China itu sendiri.

Proteksionisme merupakan kebijakan perdagangan internasional yang digunakan untuk membendung derasnya arus produk impor ke dalam negeri. Kebijakan proteksionisme dapat dilihat dari tindakan dan dikeluarkan oleh pemerintah baik langsung maupun tidak langsung, yang akan mempengaruhi struktur, komposisi, dan kelancaran usaha untuk melindungi/mendorong pertumbuhan industri dalam negeri dan penghematan devisa (Apridar, 2007). Kebijakan dapat berupa:

- a. Kebijakan *Tariff Barrier*, yakni pemungutan biaya bea masuk yang dikenakan atas produk-produk impor yang masuk untuk dipakai/dikonsumsi habis di dalam negeri.
- b. Sistem Kuota, yakni pembatasan fisik secara kuantitatif yang dilakukan atas pemasukan barang (kuota impor) dan pengeluaran barang (kuota ekspor) dari/ke suatu negara untuk melindungi kepentingan industri dan konsumen (Apridar, 2007). Pemberlakuan kuota impor pada umumnya dilandasi alasan yaitu jaminan kemungkinan kenaikan pengeluaran impor akibat persaingan perdagangan luar negeri yang makin buruk, dan penerapan kuota memberikan kekuatan dan fleksibilitas administrasi kepada pemerintah (Hardono, Rachman, & Suhartini, 2004).

Dalam kasus China, pemerintah China melakukan proteksionisme seperti di atas dengan menerapkan sistem kuota impor. Kebijakan ini terbagi dua, yakni kuota pembagian pendapatan (*revenue-sharing*) dan kuota biaya tetap (*flat-fee quota*) (Shira, ReachFurther, 2016). Pemerintah China mengeluarkan serangkaian tersebut merupakan bagian dari perlindungan pasarnya atas masuknya film Hollywood. Banyaknya film Hollywood yang masuk ke China membuat industri perfilman China tidak dapat berkembang. Terlebih saat ini China merupakan negara dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi yang mengakibatkan dana yang mengalir ke

industri perfilman lokal juga ikut meningkat, sehingga perfilman Hollywood mengancam pekerja cinema- cinema lokal dalam mengembangkan perfilman lokal. China juga merupakan negara dengan pertumbuhan bioskop terpesat didunia, menunjukkan bahwa China ingin kembali menguasai pasar domestiknya. Pendapatan besar dipasar China melalui film lokalnya dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan kebijakan tersebut efektif diterapkan walaupun dalam beberapa menentang kebijakan pasar bebas.

#### **D. Hipotesa**

Dari uraian di atas dapat ditarik bahwa China mengeluarkan kebijakan tidak lain demi kepentingan nasionalnya. Dominasi Hollywood di pasar china merupakan dasar yang pada akhirnya membuat China mengeluarkan kebijakan kuota dan sensor. Kebijakan tersebut bertujuan meruntuhkan dominasi Hollywood, melindungi pasar mereka dari imperialisme luar, dan melindungi sineas lokal termasuk di antara produsen, distributor, dan pemeran. Pada akhirnya keuntungan dari potensial pasar lokal tidak mengalir ke Hollywood melainkan ke China itu sendiri. Ancaman tersebut mengharuskan China bertindak dengan mengeluarkan kebijakan proteksionisme yang merupakan bagian dari kebijakan perdagangan internasionalnya untuk membatasi masuknya perfilman Hollywood yang masuk ke pasar domestik China serta memenuhi kepentingan ekonomi China. Kebijakan yang diambil di antaranya kuota film impor, sensor yang ketat dari Pemerintah China.

#### **E. Jangkauan Penelitian**

Berdasarkan tema yang diangkat dan untuk penulisan, penulis akan membatasi ruang lingkup dan agar tidak menyimpang dari tema atau tujuan yang diinginkan. Penelitian ini melingkupi rentang waktu 2014-2018 di mana pada rentan waktu itu film Hollywood mendominasi layar lebar China dan

industri perfilman China yang sudah berkembang dan mulai ingin menggeser posisi Hollywood sebagai aktor utama dalam industri ini.

## **F. Metode penelitian**

Untuk melengkapi data, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Menggunakan teknik pengumpulan data *library research* dengan memanfaatkan data-data sekunder yang dikumpulkan datanya melalui perpustakaan, buku, artikel jurnal, media cetak baik itu elektronik maupun non-elektronik, dan *website*.

## **G. Sistematika Penelitian**

Tulisan ini akan terdiri sebanyak empat bab. Bab pertama akan membahas tentang arah tulisan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, kerangka pikiran dan lainnya.

Bab kedua akan membahas sejarah dan perkembangan industri perfilman China dalam beberapa tahun terakhir. Dan bagaimana China mencoba untuk menggeser Hollywood sebagai aktor utama.

Bab ketiga nantinya akan membahas tentang sejarah Hollywood, dominasinya secara global dan masuknya film-film Hollywood ke pasar China yang potensial sehingga dianggap penting bagi Hollywood.

Bab ke empat akan membahas, kebijakan tersebut berupa tarif, kuota, sensor, serta kebiasaan masyarakat China. faktor-faktor yang mempengaruhi China membendung film asing yang masuk sebagai bentuk proteksi perdagangan dan *cultural*. Kemudian dilema China atas Hollywood.

Kemudian bab terakhir dari tulisan ini akan berisi tentang hal yang dapat ditarik dari keseluruhan paparan atau dekripsi fakta-fakta dan saran atau preskripsi yang konstruktif.